



Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia

Frenki¹

¹Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Email: frenki@radenintan.a.cid

Naskah diterima: Maret/2021 Revisi: Maret/2021 Disetujui: April/2021

Abstract

This study aims to analyze the politicization of identity in competitions in elections in Indonesia. Political identity is in the form of politicizing religious and ethnic symbols as a political tool. The research, descriptive analyst, from primary and secondary data sources, data collected using library research, data is processed through editing, coding, and systemizing, then analyzed using qualitative analysis by deductive thinking. The result of this research is that the candidates who participated in the political contestants in the election are likely to win while having the main capital, namely social capital, political capital, and economic capital. But, social capital is widely misused to bring down his political opponents. The politicization of religious and ethnic minority identities is considered effective for candidates to gain support from religious and majority ethnic communities. The practice of identity politicization always arises in political years, be it at the level of regional head elections. The issue of identity politicization practices in elections in Indonesia is worth noting. Because the practices have the potential to have an impact that is contrary to democratic objectives and leads to divisions that lead to political instability and disintegration of the Indonesian nation. Therefore, candidates involved in electoral contests should have high awareness and prioritize the unity and unity of the nation rather than the momentary political interest.

Keywords: Ethnic, Politicization, Electoral.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politisasi identitas dalam kompetisi pada pemilu di Indonesia. Politisasi identitas tersebut berupa mempolitisir simbol-simbol agama dan etnis sebagai alat politiknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif analitis, dari sumber data primer dan sekunder, data dikumpulkan menggunakan riset kepustakaan (*library research*), data dilolah melalui editing, coding, dan sistematizing, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa para kandidat yang ikut serta dalam kontestansi politik pada pemilu berkemungkinan menang manakalah memiliki tiga modal utama yaitu modal sosial, modal politik dan modal ekonomi. Namun, modal sosial yang dimiliki tersebut banyak disalahgunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Politisasi identitas agama dan etnis minoritas dianggap efektif bagi para kandidat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat beragama dan etnis mayoritas. Praktik politisasi identitas senantiasa muncul pada tahun politik, baik itu pada tingkat pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden. Permasalahan praktik politisasi identitas pada pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia. Untuk itu, para kandidat yang terlibat dalam kontesrtasi pilitik pada pemilu hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi dan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dari daripada kepentingan politik sesaat.

Kata kunci: Etnis, Politik, Pemilu

Pendahuluan

Pemilu diselenggarakan sebagai wujud dari pemenuhan hak-hak politik warga negara yang dijamin oleh undang-undang, yaitu adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”,¹ dan juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama

¹ ‘Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia’, Pub. L. No. UUD 1945 (n.d.), 28.

dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.² Sejak era reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014.³

Salah satu karakteristik dari pemilu adalah adanya partisipasi dari warga negara dalam kehidupan politik. Partisipasi dapat beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang resmi yaitu mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah sampai kepada bentuk yang tidak resmi. Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁴

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Setiap warga dan kelompok masyarakat dalam proses demokrasi memperoleh ruang untuk turut berpartisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaannya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan.⁵ Akan tetapi, ruang yang diperoleh tersebut dipolitisasi oleh kelompok-kelompok atas dasar identitas dalam masyarakat. Hal ini berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik.

Politisasi (*politicization*) merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan.⁶ Sementara itu, yang dimaksud identitas sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam ilmu politik dan sosiologi,

² 'Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).', Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (n.d.).

³ Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto, 'Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu', *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (11 January 2019): 287, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336>.

⁴ Ramlan Surbakti Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), 140.

⁵ Ramlan Surbakti, 114.

⁶ A. Adediji A. Adediji, *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation* (Berlin: Springer VS, 2016), 116.

yakni kategori sosial di mana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki “identitas’ yang sama. Identitas kemudian digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan.⁷ Politisasi identitas artinya identitas dipolitisasi melalui pendekatan dan interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa “sama”, baik secara ras, etnis, agama, maupun elemen perekat lainnya. Akibatnya ketika identitas- identitas yang muncul saling saling bertentangan satu sama lain dan negara tidak bisa mengatasinya, maka akan menyebabkan konflik di masyarakat.⁸

Etnis dan agama adalah bagian dari identitas yang seringkali menjadi alat atau dipolitisasi oleh sekelompok orang untuk kepentingannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Huntington, bahwa identitas-identitas primordial memang menjadi faktor utama dalam gesekan-gesekan antar peradaban. Di Indonesia, sebuah negara yang menempatkan urusan agama sebagai bagian dari urusan negara, agama seringkali menjadi sumber kekuatan dalam melakukan tekanan-tekanan terhadap kelompok berbeda.⁹

Proses politik di Indonesia telah diwarnai dengan kasus politisasi identitas agama yang mencederai nalar demokrasi. Politisasi identitas etnis dan agama mencapai titik kulminasinya pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Sejak Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta. Sentimen etnis dan agama mulai dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politiknya. Kasus penodaan agama yang menjerat Ahok menjadi kapital politik bagi lawan politiknya dalam memainkan sentimen agama di dalam kompetisi elektoral.

Perkembangan politisasi identitas dalam kompetisi pada pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik politisasi identitas tersebut berpotensi mengarah pada

⁷ P. J. Burke P. A. Thoits (Eds.), Introduction. In P. J. Burke, T. Owens, R. T. Serpe, & *Advances in Identity Theory and Research* (New York: Plenum Publishers, 2003), 1.

⁸ Nardi Maruapey, ‘Politik Identitas Boleh, Politisasi Identitas Jangan’, n.d., <https://terasmluku.com/politik-identitas-boleh-politisasi-identitas-jangan-oleh-nardi-maruapey-aktivis-mahasiswa/>.

⁹ Ibrahim, *Dari Politik Identitas Ke Politik Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Danadyaksa, 2013), 48.

dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi. Padahal dalam kehidupan yang demokratis, partisipasi dari seluruh institusi sosial diperlukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan publik yang adil.¹⁰ Politisasi identitas dengan mobilisasi atau melibatkan gerakan-gerakan massa akan mengganggu roda perekonomian. Kondisi sosial politik yang tidak stabil akan mengikis kepercayaan investor dan menyulitkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, politisasi identitas pada pemilu juga berpotensi terjadinya perpecahan di tengah masyarakat yang menyebabkan instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹¹ Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.¹² Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.¹³

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah riset kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan

¹⁰ B. Bozeman B. Bozeman, *Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism* (Washington: George Washington University Press, 2007), 109.

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 80.

¹² Etta Mamang Sangadji Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 44.

¹³ Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*.

bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah metode analisis data yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴

Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung dan diadakan setiap 5 tahun sekali¹⁵ merupakan agenda penting yang di tunggu-tunggu oleh setiap warga negara. Karena merupakan suatu momentum untuk merubah tatanan kehidupan kebangsaan, dengan membuka kebebasan pada setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Partisipasi warga negara dalam pemilu tidak hanya dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga yang mendaftarkan diri sebagai kontestan dalam pemilu, baik sebagai calon anggota DPR dan DPRD maupun sebagai calon presiden dan kepala daerah.

Mencermati prosedur dan proses pemilu secara langsung, secara metafora bisa digambarkan bahwa kontestasi pada pemilu ibarat balapan mobil. Para kandidat itu berkemungkinan memenangkan pemilu manakalah memiliki tiga kombinasi di dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para kandidat yang akan mengikuti kontestasi di dalam pemilu. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial, (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*), ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Maju Mundur, 1990), 33.

¹⁵ Ni Nyoman Yesi Rismadani and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 'Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (24 June 2019): 1-15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50514>.

dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.¹⁶

Modal Politik

Modal politik sangat penting bagi para kandidat untuk memperkuat posisi kandidat tersebut dalam kontestasi di dalam pemilu. Para kandidat memerlukan dukungan politik yang didapat dari partai politik. Partai politik merupakan organisasi politik yang dapat mengajukan seorang kandidat dalam pemilu. Oleh karena itu, para kandidat akan berusaha mencari sebanyak mungkin koalisi partai politik untuk dapat mengusungnya dalam pemilu.

Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik harus memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat prosentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan. Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar belum tentu otomatis dapat memenangkan pemilu secara langsung, karena itu dalam pemilu pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai (koalisi parpol) tidak terlalu menonjol. Peran figur kandidat dipandang sangat menentukan karena pemilu sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya.¹⁷

¹⁶ Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah, Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 89.

¹⁷ Haryanto, *Kekuasaan Elit (Suatu Bahasan Pengantar)* (Yogyakarta: JIP UGM, 2005), 72.

Modal Sosial

Latar belakang sosial yang dimiliki kandidat bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.¹⁸ Kepercayaan di gunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pemilu, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.¹⁹

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut:²⁰

1. Robert Putnam (1993), mendefinisikan modal sosial adalah suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang

¹⁸ Nurhasim, Moch, dkk, *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2003), 8.

¹⁹ Jamaluddin Ancok, 'Modal Sosial, Dan Kualitas Masyarakat' (Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Yogyakarta, tanggal 3 Mei 2003., UGM Yogyakarta, Mei 2003).

²⁰ Mefi Hermawanti, 'Penguatan Dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat', ", Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara timur (IRE Yogyakarta, 2002).

melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putman juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).

2. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).
3. James Coleman (1999), mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu,

yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.

4. Dari sudut pandang lain, North (1990) dan Olson (1982) menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

Sementara bahasan mengenai *trust* jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (*social capital*) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (*high-trust society*). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (*low-trust society*) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan *zero trust society*, ketiadaan kepercayaan. Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*)

sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah.²¹

Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

Modal Ekonomi

Modal ekonomi memiliki peranan yang sangat penting sebagai roda penggerak dan memperlancar mesin politik yang digunakan oleh kandidat dalam pemilu. Setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri.

Menurut Firmanzah, modal ekonomi yang nampak adalah uang. Modal uang digunakan untuk membiayai kampanye. Masing-masing partai/politisi berusaha untuk meyakinkan publik bahwa partai/politisi tersebut adalah partai/politisi yang lebih peduli, empati, memahami benar persoalan bangsa dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Salurannya adalah melalui media promosi, seperti TV, lobi ke ormas, koran, radio, baliho, spanduk, sewa konsultan politik dan pengumpulan massa, semuanya itu membutuhkan dana yang besar.²²

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pemilu dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa proses politik pada pemilu membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini

²¹ Francis Fukuyama, *Trust, Kebajikan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran* (Yogyakarta: Qalam, 2002).

²² Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 4.

menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar.²³

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

Fenomena Politisasi Identitas pada Pemilu

Fenomena politisasi identitas dialami oleh setiap negara, di Indonesia politisasi identitas terkait dengan persoalan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elit berdasarkan kepentingannya masing-masing.²⁴ Fenomena terjadinya politisasi identitas berbasis agama²⁵ dan etnis semakin menguat menjelang pemilu di Indonesia. Kubu-kubu pendukung kandidat saling membentuk poros untuk melawan satu sama lain melalui identitas yang melekat pada karakter personal kandidat yang kemudian diteruskan pada komponen-komponen pendukungnya. Polarisasi poros kandidat pada pemilihan presiden misalnya, antara Prabowo dan Jokowi terlihat menyiratkan kalangan yang dapat dikategorikan berdasarkan identitas agama. Partai-partai berbasis Islam banyak yang mendukung pendukung Prabowo, seperti PKS dan PAN. Sementara partai berbasis Islam pendukung Jokowi hanya PKB dan PPP. Partai

²³ Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin, *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia* (Yogyakarta: IPD, 2009), 120–21.

²⁴ Erman and Muchid Albintani, 'Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 17, no. 29 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7054>.

²⁵ Identitas agama dimaknai sebagai kekuatan politik atau alat legitimasi atas dasar normativitas doktrinal transenden. Di samping itu, identitas keagamaan menjadi simbolisasi praktik-praktik politik dan juga implementasinya untuk merangkul simpati dari pengikutnya. Lihat Yeby Ma'asan Mayrudin and M. Chairil Akbar, 'Pergulatan Politik Identitas Partai-Partai Politik Islam: Studi Tentang PAN, PKB Dan PKS', *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (20 August 2019): 169–86, <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1606>.

pengusung utama Jokowi, yakni PDIP yang merepresentasikan nasionalis sekuler kiri memberikan warna tersendiri atas kontestasi pemilu dengan nuansa aliran.

Nuansa identitas-aliran, Islam berhadapan dengan nasionalis sekuler, memenuhi diskursus rivalitas politik terutama di media sosial. Sepanjang kampanye Pilpres 2019, berbagai kampanye hitam yang memojokkan lawan politik seringkali menyinggung karakteristik agama dan etnis kandidat. Misalnya, tuduhan bahwa Jokowi adalah seorang yang lahir dari simpatisan PKI dan keturunan China yang anti-Islam. Sementara Prabowo diidentikkan dengan sosok militer diktator dan didukung oleh kelompok Islam radikal serta intoleran.

Politisasi identitas mendapatkan momentum pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Pertarungan memperebutkan kursi DKI 1 kemudian dipenuhi oleh sentimen agama semenjak Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, dituduh melakukan penistaan terhadap Islam ketika melakukan pidato kedinasan di Kepulauan Seribu pada September 2016. Setelah potongan video pidato tersebut tersebar luas di media sosial, berbagai kelompok Islam melakukan aksi unjuk rasa baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Aksi yang diikuti oleh ratusan ribu hingga jutaan peserta itu dinamai sebagai Aksi Bela Islam yang dilakukan tiga kali, yaitu pada 17 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016. Mereka menuntut pemerintah supaya proses hukum terhadap Ahok atas tuduhan penistaan agama ditegakkan. Mereka antara lain Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (PNPF-MUI), dan puluhan organisasi Islam lainnya.

Aksi unjuk rasa yang terjadi terus menerus tidak hanya ditujukan kepada Ahok, tetapi juga Jokowi karena dianggap sebagai pendukung utama Ahok. Seiring dengan tekanan besar dari berbagai daerah, elektabilitas Ahok terus menyusut. Pada akhirnya, pemilihan gubernur dimenangkan oleh pasangan Anies-Sandi dengan yang didukung oleh Partai Gerindra dan PKS jumlah suara 57,96 persen. Kemenangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI 2017 tidak terlepas dari sikap sebagian besar pemilih yang mementingkan agama dan didukung oleh kekuatan kelompok-kelompok Islam.

Mobilisasi massa dalam Aksi 411 dan 212 di Jakarta menjadi bukti nyata menguatnya solidaritas muslim di Jakarta khususnya bahkan di berbagai daerah di Indonesia dalam merespons isu penodaan agama yang dilakukan Ahok. Di sisi lain, mobilisasi massa tersebut bernuansa politisasi agama. Dari tuntunan penegakan hukum terhadap Ahok, melebar menjadi ladang politik praktis untuk menyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang haramnya kepemimpinan non-muslim dalam Islam yang wacananya digulirkan dalam aksi tersebut. Dengan menggunakan eksemplar Aksi 212 yang diadakan mendekati hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta, dapat mengindikasikan adanya mobilisasi massa dalam rangka kepentingan politik tertentu. Kasus penodaan agama yang menjerat Ahok dijadikan magnet kepentingan politik sebagai legitimasi terhadap politisasi agama yang dilakukan oleh lawan politiknya pada saat itu.

Mobilisasi massa dapat berjalan dengan massif apabila mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Salah satu kunci dukungan itu adalah apabila mampu menjadi kekuatan yang menampung atau merepresentasikan keluhan yang dirasakan secara luas oleh masyarakat. Karena itu, isu-isu yang sensitif, termasuk isu-isu identitas etnis dan keagamaan, dapat dijadikan sebagai modal untuk meraih simpati dari masyarakat. Pada berbagai kesempatan, politisasi identitas dalam pemilu termanifestasi pada upaya-upaya mobilisasi massa untuk menunjukkan kekuatan jumlah (*the power of numbers*) kepada penguasa. Namun, mobilisasi massa yang berlangsung terus-menerus tentu akan mengganggu stabilitas politik. Konsentrasi massa di ruang-ruang publik akan memicu gerakan-gerakan tandingan, sehingga friksi dan konflik sosial tidak terhindarkan lagi.

Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilu

Pelaksanaan pemilu di Indonesia ditandai dengan menguatnya politisasi identitas. Isu-isu yang berkaitan dengan etnis, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elite politisi untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya. Maraknya diskursus yang mengaitkan isu agama dan politik dalam pemilu

serta munculnya gelombang unjuk rasa yang menyertai Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 merupakan indikasi menguatnya politisasi identitas.

Politisasi identitas sepertinya telah menemukan momentum pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Kemenangan Anis-Sandi seolah-olah membuktikan bahwa politisasi identitas kembali dapat dijadikan kekuatan elektoral yang efektif untuk melawan kekuatan politik yang dominan. Pola tersebut berpotensi untuk digunakan pada pilkada, terutama di daerah-daerah berpenduduk banyak seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebab, kemenangan di daerah-daerah tersebut dianggap dapat membuka peluang yang lebih lebar bagi kemenangan pemilu legislatif dan pilpres.

Politisasi (*politicization*) merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan.²⁶ Sementara yang dimaksud identitas sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam ilmu politik dan sosiologi, yakni kategori sosial di mana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki 'identitas' yang sama. Identitas kemudian digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan.²⁷ Politisasi identitas diartikan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas apakah itu berbasis agama, etnis, atau penganut ideologi tertentu untuk menimbulkan opini atau stigma dari masyarakat dengan tujuan kepentingan politik.

Politisasi identitas tidak terlepas dari masih lemahnya institusionalisasi partai politik di Indonesia, sehingga mendorong para politisi berkolaborasi dengan aktor-aktor *civil society* untuk mereproduksi isu-isu identitas demi kepentingan pemilu. Salah satu faktor lemahnya institusionalisasi partai politik, yakni personalisasi partai politik oleh figur pemimpinnya yang terhubung dengan jejaring basis massa yang

²⁶ A. Adediji, *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation*, 115.

²⁷ P. A. Thoits (Eds.), *Advances in Identity Theory and Research*, 1.

tidak jarang merepresentasikan identitas tertentu.²⁸ Hal tersebut menjadikan politisasi identitas semakin terfasilitasi dalam berbagai ajang pemilu.

Mencermati praktik politisasi identitas yang terjadi di Indonesia ditandai dua hal. Pertama, setiap aktor yang bertarung dalam mengikuti pemilu dominan memainkan modal mereka dari modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Namun demikian, modal yang paling berperan dalam kontestasi politik adalah modal sosial dan modal politik serta didukung oleh modal ekonomi. Modal sosial yang dimiliki aktor adalah jaringan dan relasi dalam masyarakat yang diciptakan melalui jaringan dalam bentuk investasi sosial, yakni sebagai aktivis dan syiar agama sedangkan jaringan aktor dibangun melalui pimpinan partai politik, pengusaha dan elit politik. Modal politik senantiasa didukung oleh kuatnya hubungan antara aktor dan partai politik serta pengalaman aktor di birokrasi, baik sebagai eksekutif maupun legislatif. Identitas agama dan etnis yang dipropagandakan dalam kontestasi politik hanyalah sebagai alat legitimasi politik sesaat untuk kepentingan politis. Pertentangan antara kelompok Islam dan nasionalis sengaja diciptakan oleh aktor politik. Sehingga, dampak dari praktik politik identitas jika senantiasa direproduksi akan memicu disintegrasi yakni, ketimpangan antar kelompok dan konflik komunal.

Dampak Politisasi Identitas terhadap Integrasi Bangsa

Perkembangan politisasi identitas dalam pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Perjuangan solidaritas kelompok di sisi lain juga mengandung upaya mempromosikan ketidaksetaraan hak sipil dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.²⁹ Padahal, dalam kehidupan yang demokratis, partisipasi

²⁸ M. Buehler & P. Tan, 'Party-Candidate Relationships In Indonesian Local Politics: A Case Study Of The 2005 Regional Elections In Gowa' (South Sulawesi Province, Indonesia, 2007), 84.

²⁹ O. Tornquist K. Stokke (Eds.), K. Stokke (Eds Introduction: The Problem is Representation. In O. Tornquist, N. Webster, &, *Rethinking Popular Representation* - Google Books (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 7.

dari seluruh institusi sosial diperlukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan publik yang adil.³⁰

Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap kelompok identitas untuk turut berpartisipasi dan mencapai kepentingannya. Akan tetapi, politisasi identitas juga berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri apabila menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik.

Politisasi identitas yang melibatkan gerakan-gerakan massa akan mengganggu roda perekonomian. Kondisi sosial politik yang tidak stabil akan mengikis kepercayaan investor dan menyulitkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pertentangan politik berdasarkan identitas pun dapat merusak modal sosial, sehingga menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan pencapaian-pencapaian terbaiknya.

Mobilisasi massa yang berlangsung secara massif dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kekacauan politik sama artinya dengan ketidakpastian bagi para pelaku usaha dan tentu dapat mengakibatkan kerugian baik materi maupun materiil. Ketika pemerintah membutuhkan investasi dari sektor swasta untuk menggulirkan program pembangunan, terutama infrastruktur, maka kekacauan akibat aksi-aksi massa akan menambah kesulitan pemerintah dalam mencapai program-program yang justru semestinya segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Karena upayanya yang bekerja di ranah kesadaran dan emosi masyarakat, politisasi identitas berpotensi mengganggu modal sosial dan lebih luas lagi dapat mengancam integrasi bangsa. Politik identitas pada dasarnya bersifat *selfinterest*, atau mengutamakan pencapaian kepentingan kelompoknya. Politisasi identitas berseberangan dengan semangat kesatuan karena terlalu menekankan keragaman. Penekanan politisasi solidaritas kelompok yang spesifik dan identitas akan merusak kesatuan sosial politik, memperparah pembelahan sosial yang pada akhirnya justru

³⁰ B. Bozeman, *Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism*, 109.

mengurangi peluang untuk mencapai tujuan kelompok tersebut, tetapi hanya diarahkan untuk meraih tujuan segelintir elit. Kolaborasi partai politik dengan kelompok-kelompok militan dalam upaya memobilisasi suara justru akan semakin memperparah keadaan. Kelompok-kelompok tersebut cenderung menonjolkan perbedaan dan menyediakan pedoman perilaku serta berupaya memonopoli kebenaran dan kepatuhan total pada konformitas kelompoknya.³¹

Namun, politik identitas bukan berarti tindakan yang selalu dianggap negatif atau berseberangan dengan demokrasi. Politisasi identitas berupa aksi-aksi kolektif juga merupakan jalan yang sah bagi kelompok-kelompok yang tersisih dari aspek sosial ekonomi dan politik untuk meraih kepentingannya, ketika saluran-saluran institusional kurang tersedia untuk mereka. Karena itu, supaya kelompok-kelompok yang marjinal harus diintegrasikan pada kelompok *mainstream* daripada terus merayakan perbedaan. Perbedaan yang didominasi politik identitas yang sempit akan menghilangkan makna nasionalisme. Karena itu, solusi yang bisa ditempuh yaitu menekankan kembali identitas (*re-identity*) nilai-nilai kebangsaan.

Kesimpulan

Pemilu di Indonesia merupakan agenda penting yang di tunggu-tunggu oleh setiap warga negara. Karena merupakan suatu momentum bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi. Partisipasi warga negara dalam pemilu tidak hanya dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan warga dapat mendaftarkan diri sebagai kontestan dalam pemilu.

Para kandidat mengikuti kontestasi pada pemilu berkemungkinan menang manakalah memiliki modal sosial dan modal politik serta didukung oleh modal ekonomi. Modal sosial yang dimiliki aktor adalah jaringan dan relasi dalam masyarakat yang diciptakan melalui jaringan dalam bentuk investasi sosial, yakni sebagai aktivis dan syiar agama sedangkan jaringan aktor dibangun melalui pimpinan partai politik, pengusaha dan elit politik.

³¹ Vertigans, S., *Militant Islam: A Sociology of Charcetristics, Causes and Consequences* (United Kingdom: Taylor & Francis, 2008), 52.

Modal sosial, politik dan ekonomi yang dimiliki para kandidat digunakan dengan memunculkan isu-isu agama dan etnis untuk menjatuhkan lawan politiknya. Identitas agama dan etnis dipropagandakan hanyalah sebagai alat legitimasi politik sesaat untuk kepentingan politis. Politisasi identitas ini terjadi pada tingkat pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden. Misalnya, tuduhan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan penistaan terhadap Islam ketika melakukan pidato kedinasan di Kepulauan Seribu pada September 2016. Begitu juga tuduhan terhadap Jokowi yang lahir dari simpatisan PKI dan keturunan China yang anti-Islam. Sementara, Prabowo diidentikkan dengan sosok militer diktator dan didukung oleh kelompok Islam radikal serta intoleran. Politisasi identitas ini dijadikan kekuatan elektoral yang efektif untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Praktik politisasi identitas pada pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia.

Bibliography

- A. Adediji, A. Adediji. *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation*. Berlin: Springer VS, 2016.
- B. Bozeman, B. Bozeman. *Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism*. Washington: George Washington University Press, 2007.
- Cahya, Fikri Zikri Ramdanu, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto. 'Politik Hukum Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu'. *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (11 January 2019): 281-304.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25336>.
- Erman, and Muchid Albintani. 'Politik Identitas dan Negara Bangsa di Riau'. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 17, no. 29 (2018): 1-13.
<https://doi.org/10.35967/jipn.v17i29.7054>.

- Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi, 2010.
- Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan Dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Francis Fukuyama. *Trust, Kebajikan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin. *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*. Yogyakarta: IPD, 2009.
- Haryanto,. *Kekuasaan Elit (Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: JIP UGM, 2005.
- Ibrahim,. *Dari Politik Identitas Ke Politik Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Danadyaksa, 2013.
- Imam Gunawan,. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Jamaluddin Ancok. 'Modal Sosial, Dan Kualitas Masyarakat'. Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Yogyakarta, tanggal 3 Mei 2003., UGM Yogyakarta, Mei 2003.
- K. Stokke (Eds.), K. Stokke (Eds, O. Tornquist, Introduction: The Problem is Representation. In O. Tornquist, N. Webster, &. *Rethinking Popular Representation - Google Books*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Kacung Marijan. *Demokratisasi Di Daerah, Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Maju Mundur, 1990.
- M. Buehler & P. Tan. 'Party-Candidate Relationships In Indonesian Local Politics: A Case Study Of The 2005 Regional Elections In Gowa'. South Sulawesi Province, Indonesia, 2007.
- Mayrudin, Yeby Ma'asan, and M. Chairil Akbar. 'Pergulatan Politik Identitas Partai-Partai Politik Islam: Studi Tentang PAN, PKB Dan PKS'. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (20 August 2019): 169-86. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/1606>.

- Mefi Hermawanti, 'Penguatan Dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat'.
", Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat di Nusa Tenggara timur. IRE Yogyakarta, 2002.
- Nardi Maruapey. 'Politik Identitas Boleh, Politisasi Identitas Jangan', n.d.
<https://terasmaluku.com/politik-identitas-boleh-politisasi-identitas-jangan-oleh-nardi-maruapey-aktivis-mahasiswa/>.
- Nurhasim, Moch, dkk. *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2003.
- P. A. Thoits (Eds.), P. J. Burke, Introduction. In P. J. Burke, T. Owens, R. T. Serpe, & *Advances in Identity Theory and Researc*. New York: Plenum Publishers, 2003.
- Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. UUD 1945 (n.d.).
- Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)., Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (n.d.).
- Ramlan Surbakti, Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Rismadani, Ni Nyoman Yesi, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 'Perlindungan Hukum Hak Politik Pekerja Migran Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia'. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (24 June 2019): 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50514>.
- Vertigans, S. *Militant Islam: A Sociology of Charcetristics, Causes and Consequences*. United Kingdom: Taylor & Francis, 2008.